## Santi Novi Hasanah

Program Studi D3 Akuntansi STIE Putra Bangsa Kebumen

santinovihasanah@gmail.com

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda.

Berdasarkan hasil olah data, menjelaskan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah, sedangkan dilihat dari kontribusinya pajak daerah lebih dominan mempengaruhi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yakni 97,80%, sedangkan untuk kontribusi retribusi daerah sebesar 5,70%.

Kata kunci: Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah.

#### **Abstract**

The research aimed the effect of regional taxes revenue and regional retribution on the local Own-source Revenue of Kebumen Regenery. The data analycis used in this study was multiple linier regression analysis.

Based on the results of data processing, indicated that regional taxes and regional retribution had an effect an Local Own-source Revenue while saw from the contribution that regional tax more dominanthy affects on increase in Local Own-source Revenue (PAD) 0f 97,80%, while the contribution of regional retribution was only 5,70%.

Keywoard: Regional taxes, Regional retribution, Local Own-source Revenue.

## **PENDAHULUAN**

Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik dimana di Indonesia dikenal dengan adanya daerah-daerah otonomi sebagai akibat dari dianutnya asas desentralisasi. Desentralisasi dilakukan dengan harapan daerah memiliki kemampuan untuk membiayai pembangunan daerahnya sesuai dengan prinsip daerah otonom yang nyata. Otonomi Daerah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Dearah. Sebagai daerah otonom daerah dituntut untuk dapat mengembangkan dan mengoptimalkan semua potensi daerah, yang digali dari dalam yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah. Daerah otonom dikatan berhasil atau tidaknya tegantung dari Pendapatan Asli Daerah yang mampu untuk mencukupi keperluan rumah tangga penyelenggaraan pemerintahan daerahnya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tulang punggung pembiayaan daerah. Oleh karenanya, kemampuan suatu daerah menggali PAD akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah tersebut. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat dimaksimalkan pengelolaannya adalah pemasukan dari penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Perpajakan merupakan salah satu komponen penting dalam perekonomian Indonesia, hal ini tercermin dalam APBN dengan jumlah pendapatan dari pajak hingga triliun pada APBN. Dalam rangka penyelenggaraan pembangunan dan menunjang pemerintahan daerah, pemerintah berhak mengenakan pemungutan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah kepada wajib pajak.

Tabel I. 1 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008-2017

11000111011 1411011 2000 2017							
Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	PAD				
2000	Rp	Rp	Rp				
2008	10.986.412.576	27.074.596.905	58.998.761.087				
	Rp	Rp	Rp				
2009	10.964.523.583	32.024.576.227	64.194.504.063				
	Rp	Rp	Rp				
2010	12.766.716.981	35.332.079.017	59.515.157.129				
	Rp	Rp	Rp				
2011	17.326.903.745	16.489.271.659	74.006.748.748				
	Rp	Rp	Rp				
2012	20.375.075.302	24.884.266.714	104.025.117.108				
	Rp	Rp	Rp				
2013	42.012.443.873	24.542.086.173	131.471.780.680				
	Rp	Rp	Rp				
2014	46.312.651.913	43.343.968.696	227.351.115.412				
	Rp	Rp	Rp				
2015	52.015.233.621	26.880.912.870	245.143.887.821				
	Rp	Rp	Rp				
2016	62.844.699.529	25.540.059.119	290.914.495.827				
	Rp	Rp	Rp				
2017	79.479.454.753	22.486.222.835	443.512.538.190				

Dari tebel diatas dapat dilihat bahwa adanya kenaikan disetiap tahunnya pada pendapatan pajak daerah. Kenaikan tersebut selain dari kontribusi Pajak Bumi dan Bagunan (PBB), pajak penerangan jalan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) melainkan dari kesadaran wajib pajak yang meningkat, pelayan BAPPENDA yang cukup meningkat serta

pemisahan BPKAD dengan BAPPENDA. Namun kenaikan pendapatan pajak daerah tidak diikuti dengan retribusi daerah yang ikut naik. Dilihat dari realisasi pendapatan daerah Kabupaten Kebumen pada tiga tahun terakhir atau pada tahun 2015-2017 retribusi daerah mengalami penurunan. Penurunan ini disebabkan dari retribusi jasa umum dan retribusi perizinan. Dimana retribusi jasa umum ini disebabkan baru beroperasinya pelayanan kesehatan dari Prembun sekitar bulan Mei, sedangkan dari retribusi perizinan ini karena kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk mengajukan izin mendirikan bangunan. Dengan permasalahan yang ada dimana retribusi daerah yang selalu menurun selama tiga tahun terakhir (2015-2017) akan berengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008-2017.

#### Rumusan Masalah:

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- 1. Apakah pajak daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2008-2017?
- Apakah retribusi daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2008-2017?
- 3. Apakah pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2008-2017?

## TINJAUAN PUSTAKA

#### Pendapatan Asli Daerah

Menurut Siregar (2017: 32) Pendapatan Asli Dearah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh Pemerintah Daerah dari sumber-sumber wilayahnya sendiri yang dipunggut berdasarkan Peraturan Daerah. Pendapatan Asli Daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

#### Sumber Pendapatan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari:

- 1. Pajak Dearah;
- 2. Retribusi Daerah;
- 3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan;
- 4. Lain-lain PAD yang sah.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, yang dimaksud dengan lain-lain PAD yang sah adalah sebagai berikut:

- 1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
- 2. Jasa giro;
- 3. Pendapatan bunga;

- Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- 5. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang atau jasa oleh Daerah.

## Pajak Dearah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa Pajak Daerah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat.

## Jenis-jenis Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- 1. Pajak Provinsi, terdiri dari:
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
  - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaran Bermotor;
  - d. Pajak Air Permukaan; dan
  - e. Paiak Rokok.
- 2. Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari:
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Penerangan Jalan;
  - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - g. Pajak Parkir;
  - h. Pajak Air Tanah;
  - i. Pajak Sarang Burung Walet;
  - j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan:
  - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

#### Retribusi Daerah

Menurut Mardiasmo (2016: 18-20) Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

#### Objek Retribusi Daerah

Menurut Mardiasmo (2016: 18-20) objek Retribusi Daerah terdiri dari:

- Retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Jenis retribusi jasa umum adalah:
  - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
  - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
  - c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;

- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- f. Retribusi Pelayanan Pasar;
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus:
- k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
- 1. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- m. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
- n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomikasi.
- Retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. Jenis retribusi jasa usaha adalah:
  - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
  - b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
  - c. Retribusi Tempat Pelelangan;
  - d. Retribusi Terminal;
  - e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
  - f. Retrubusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
  - g. Retribusi Rumah Potong Hewan;
  - h. Retribusi Pelayanan ke Pelabuhanan;
  - i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
  - j. Retribusi Penyebrangan di Air; dan
  - k. Retibusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- 3. Retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah. Jenis retribusi perizinan tertentu adalah:
  - a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
  - b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
  - c. Retribusi Izin Gangguan;
  - d. Retribusi Izin Trayek; dan
  - e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

#### Penelitian Terdahulu

Kusuma dan Wirawati (2013) Hasil uji t menjelaskan bahwa penerimaan pajak dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap peningkatan PAD Sekabupaten/Kota di Provinsi Bali, sedangkan dilihat dari kontribusinya, pajak daerah lebih dominan mempengaruhi peningkatan PAD Sekabupaten/Kota di Provinsi Bali yakni sebesar 84,9% sedangkan kontribusi daerah sebesar 16,6%.

Beta Asteria (2015) Berdasarkan hasil peneliti uji koefisien determinasi ( $adjusted\ R^2$ ) ini menunjukan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bersamasama berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Jawa Tengah sebesar 91,90% dan sisanya 8,10% dijelaskan oleh variabel lain.

## Pengembangan Hipotesis Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Samudra (2015: 52) dalam Effendi (2018: 25) menyatakan bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah serta ditentukan dalam menentukan besarnya tarif pajak yang harus dibayarkan.

Hal ini konsisten dengan penelitian Sunanto (2015) dalam Effendi (2018: 25) bahwa penerimaan pajak daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sumber penerimaan yang dapat digali salah satunya berupa pajak daerah yang merupakan andalan bagi daerah dan diharapkan dari sumber penerimaan tersebut dapat memberikan kontribusi yang berarti terhadap Pendapatan Asli Daerah (Fitriana, 2014 : 1884). Semakin tinggi penerimaan pajak daerah maka akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), semakin rendah penerimaan pajak daerah maka akan menurunkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Maka dapat disimpulkan bahwa pajak daerah dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah.

#### Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Retribusi daerah menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah mempunyai peranan yang sangat besar terhadap pelaksanaan otonomi daerah untuk merealisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hal ini sejalan dengan penelitian Kusuma dan Wirawati (2013) dalam Effendi (2018: 25-26) bahwa penerimaan retribusi daerah dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah. Semakin besar jumlah penerimaan retribusi daerah maka akan semakin besar pula jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

## **Hipotesis**

Hipotesis merupakan pendapat sementara dan pedoman arah dalam penelitian yang disusun berdasarkan teori terkait yang akan dianalisis yang dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang menghubungkan variabel independen yaitu pajak daerah dan retribusi daerah dengan variabel dependen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan teori yang ada sebagai dasar pemikiran yang bersifat teoritis dan hubungan antara masing-masing variabel hipotesis sementara penelitian ini adalah sebagai berikut:

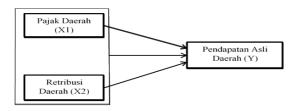
H1= Pajak daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen.

H2= Retribusi daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen.

H3= Pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen.

#### Kerangka Pemikiran

Berdasarkan latar belakang masalah, kajian pustaka dan penelitian terdahulu yang relevan, maka dapat dibuat kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar II. 1 Kerangka Pemikiran

#### METODOLOGI PENELITIAN

#### Jenis Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka-angka atau data kualitatif yang disajikan dalam bentuk angka yang diperoleh dari hasil pengamatan dalam suatu periode tertentu.

#### **Populasi**

Populasi dalam penelitian ini adalah data realisasi pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2008-2017 yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah.

#### Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini ada tiga, yaitu dua variabel bebas (*independent variable*) dan satu variabel terikat (*dependent variable*). variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah variabel bebas sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai variabel terikatnya.

## Teknik Analisis Data

## a. Analisis Regresi Sederhana

Menurut sugiyono (2009-275) menjelaskan bahwa regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium), bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya).

$$PAD = \alpha + \beta X1 + \beta X2 + e$$

Keterangan:

PAD = Pendapatan Asli Daerah

 $\alpha$  = Konstanta

 $\beta$  = Koefisien Regresi

 $X_1$  = Pajak Daerah

 $X_2$  = Retribusi Daerah

e = error

## b. Uji Multikolonieritas

Ghozali (2018: 107) menjelaskan uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independen. Uji multikolonieritas dapat dilakukan dengan menganalisis nilai tolerance Variance Inflation factor (VIF).

## Uii Autokorelasi

Menurut Ghozali (2013: 107) Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada peroiode t-1 (sebelumnya). Uji Durbin Watson (DW test) adalah salah satu cara untuk menguji ada atau tidaknya autokorelasi.

#### Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.

## Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2013) Berdasarkan tampilan Normal P-P Plot Regression Standardized terlihat bahwa data atau titik-titik menyebar disekitar garis dan mengikuti arah garis diagonal dapat dikatan data tersebut terdistribusi normal.

#### Uii t

Menurut Ghozali (2009: 17) uji t pada dasarnya menunjukan seberapa jauh pengaruh antara satu variabel secara individual independen dalam menerangkan variabel dependen.

#### Uji F

Menurut Ghozali (2009: 16) menjelaskan bahwa uji signifikansi simultan atau uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan model penelitian mempunyai pengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap predikator.

## Uji Determinasi

Menurut Ghozali (2009: 87) menjelaskan bahwa koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan modal menerangkan variasi variabel dependen.

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Regresi Linier Berganda

Tabel IV.1 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		В	Std. Error	Beta	t	Sig.
1 (	(Constant)	-122,725	630,189		-,195	,851
	$X_1$	,954	,083	,978	11,506	,000
	$X_2$	,162	.242	.057	.671	,524

Berdasarkan hasil uji statistik regresi pada tabel maka dap

disusun persamaan regresi sebagai berikut:

 $Y = \alpha + \beta X 1 + \beta X 2 + e$ 

Y = -122,725 + 0,954X1 + 0,162X2 + e

Persamaan diatas memiliki arti sebagai berikut:

#### Konstanta (∝)

Nilai konstanta ( $\alpha$ ) adalah sebesar -122,725 artinya nilai konstanta ini menunjukan bahwa jika seluruh variabel independen pajak daerah (X<sub>1</sub>) dan retribusi daerah (X2) sama dengan nol, maka Pendapatan Asli Daerah (Y) mempunyai nilai sebesar -122,725.

## Koefisien Regresi $\beta(X_1)$

Nilai koefisien regresi variabel pajak daerah (X<sub>1</sub>) sebesar 0,954 yang berarti apabila terjadi kenaikan pada variabel pajak daerah (X<sub>1</sub>) dalam satu satuan, maka dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,954 atau 9,54%. Koefisien antara pajak daerah (X<sub>1</sub>) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bernilai positif, artinya semakin meningkat pendapatan pajak daerah (X1) maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga akan meningkat.

## 3. Koefisien Regresi $\beta(X_2)$

Nilai koefisien regresi variabel retribusi daerah (X<sub>2</sub>) sebesar 0,162 yang berarti apabila terjadi kenaikan pada variabel retribusi daerah (X2) dalam satu satuan, maka dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 0,162 atau 1,62%. Koefisien antara retribusi daerah (X2) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bernilai positif, artinya semakin meningkat pendapatan retribusi daerah (X2) maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga akan meningkat.

#### Uji Multikolinealitas

Tabel IV.2 Hasil Uji Multikolinealitas

		Unstand Coeffi		Standardized Coefficients			Collinearity Statistics	
M	odel	В	Std. Error	Beta	Т	Sig.	Tolera nce	VIF
1	(Con stant)	-122,725	630,189		,195	,851		
	$X_1$	,954	,083	,978	11,5 06	,000	,992	1,008
	$X_2$	,162	,242	,057	,671	,524	,992	1,008

Sumber: Output SPSS

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada tabel dapat dilihat bahwa tolerance pajak daerah (X<sub>1</sub>) dan retribusi daerah  $(X_2)$  sebesar 0.992 > 0.10. Sedangkan dilihat dari VIF pajak daerah (X<sub>1</sub>) dan retribusi daerah ( $X_2$ ) sebesar 1,011 < 10,0 yang artinya tidak terjadi multikolinieritas. Dengan demikian model regresi dalam penelitian ini layak dipakai.

## Uji Autokorelasi

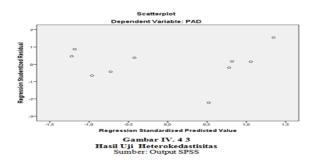
Tabel IV.3 Hasil Uji Autokorelasi

1			douel Sullil	lai y	
		R	Adjusted	Std. Error of the	Durbin-
Model	R	Square	R Square	Estimate	Watson
1	,975a	,950	,935	18,88008	1,852
a. Predi	ctors: (	Constant)	X2 X1		

b. Dependent Variable: PAD Sumber: Output SPSS

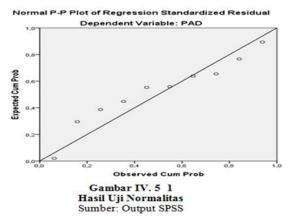
Hasil pengujian *Durbin-Watson Test* dihasilkan angka 1,852 sehingga tidak terdapat autokorelasi, dengan ketentuan tidak adanya autokorelasi adalah du < d < 4-du. Berdasarkan DW tabel dengan jumlah data (n= 10) dan jumlah variabel bebas (k= 2) diperoleh nilai dl= 0.6972, du= 1,6413 dan 4-du= 2,3587. Maka diperoleh hasil 1,6413 lebih kecil dari 1,852 dan lebih kecil dari 2,3587 (4-du). Sehingga data penelitian bebas dari gejala autokorelasi.

#### Uji Heterokedastisitas



Berdasarkan gambar IV.4 hasil uji heterokedastisitas menunjukan bahwa tidak ada pola tertentu, seperti titiktitik (poin) yang membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit) dan tidak ada pola yang jelas. Sehingga dapat dapat disimpulkan model regresi dalam penelitian ini tidak terjadi heterokedastisitas.

## Uji Normalitas



Berdasarkan gambar IV.5 di atas, dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Hasil Uji t

Tabel IV.4 Hasil Uji-test

	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model	В	Std. Error	Beta	T	Sig.
1 (Constant)	-122,725	630,189		-,195	,851
$X_1$	,954	,083	,978	11,506	,000
$X_2$	,162	,242	,057	,671	,524

a Dependent Variable: PAD Sumber: Output SPSS Uji t dilakukan dengan membandingkan  $t_{hitung}$  dan  $t_{tabel}$ . Pada penelitian ini menggunakan taraf signifikan 5%:2=2,5% (uji dua sisi) dengan derajat kebebasan (df) = n-k-1atau 10-2-1= 7 (n adalah jumlah sempel, dan k adalah jumlah variabel independen). Dengan pengujian dua sisi (signifikansi 0,025) maka hasil diperoleh  $t_{tabel}$  sebesar 2,364. Sehingga didapat pengujian sebagai berikut:

- 1. Variabel pajak daerah  $(X_1)$  memiliki  $t_{hitung}$  sebesar 11,506 lebih besar dari  $t_{tabel}$  sebesar 2,364 (11,506 > 2,364) dan nilai sig 0,000 (0,000 < 0,05) ini berarti variabel pajak daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil ini membuktikan bahwa Hipotesis (H1) diterima. Pajak daerah berpengaruh terhadap Pendaptan Asli Daerah.
- Variabel retribusi daerah (X<sub>2</sub>) memiliki t<sub>hitung</sub> sebesar 0,671 lebih kecil dari t<sub>tabel</sub> sebesar 2,364 (0,671 < 2,364) dan nilai sig 0,524 (0,524 > 0,05) ini berarti variabel retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil ini membuktikan bahwa Hipotesis (H2) ditolak. Retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

## Uji F- Statistik

Tabel IV.5 Hasil Uii Statistik

	o c				
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	47232,798	2	23616,399	66,253	,000b
Residual	2495,202	7	356,457		
Total	49728,000	9			
a.Dependent Vari	able: PAD				

Dari tabel di atas taraf signifikan 0,000 < 0,05, maka dapat dikatakan terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

## Rumus F tabel

N1	= k-1	N2	=n-k
	=3-1		=10-3
	=2		=7(F  tabel = 4.74)

Dari data di atas didapat nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  yaitu sebesar 66,263 > 4,74. Artinya variabel independen (pajak daerah dan retribusi daerah) secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (Pendapatan Asli Daerah).

## Uji Koefisien Determinasi Tabel IV.6 Hasil Koefisien Determinasi

Model Summary<sup>b</sup>

		R	Adjusted R	Std. Error of the
Model	R	Square	-	Estimate
1	,975ª	,950	,935	18,88008

a.Predictors: (Constant), RD,PD

b.Dependent Variable: PAD c.Sumber: Output SPSS

6

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi, besarnya adjusted R square adalah 0,935 atau 93,5%. Hal ini berarti 93,5% Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen dipengaruhi oleh dua variabel independen yaitu pajak daerah dan retribusi daerah. Sedangkan sisanya 100% - 93,5% = 6,5% dipengaruhi oleh variabel lain diluar kedua variabel independen tersebut.

#### Pembahasan

## 1. Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen

Pengujian hipotesis yang telah dilakukan menunjukan bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008-2017. Hal ini dibuktikan dengan nilai variabel pajak daerah memiliki thitung sebesar 10,610 yang lebih besar dari t<sub>tabel</sub> sebesar 2,364 (10,620 > 2,364) dan nilai sig 0,000 (0,000 < 0,05). Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi pendapatan pajak daerah Kabupaten Kebumen maka Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen akan semakin meningkat, sebaliknya semakin rendah pendapatan pajak daerah Kabupaten Kebumen maka Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen semakin menurun. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusuma dan Wirawati (2013) dimana temuan penelitiannya menyimpulkan bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah se-Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

## 2. Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen.

Pengujian hipotesis yang telah dilakukan menunjukan bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2008-2017. Hal ini dibuktikan dengan nilai variabel retribusi daerah memiliki t<sub>hitung</sub> sebesar 0,224 lebih kecil dari t<sub>tabel</sub> sebesar 2,364 (0,224 < 2,364) dan nilai sig 0,829 (0,829 > 0,05). Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi atau semakin rendah retribusi daerah di Kabupaten Kebumen tidak berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lakoy, et al., (2016), dimana retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Dearah. Menurut Lakoy, et al., (2016) dalam risetnya menyarankan dengan hasil yang ada di pemerintah Kabupaten Minahasa untuk melakukan penyuluhan terhadap pentingnya kewajiban membayar retribusi yang ada pada masyarakat. Hal ini bisa dijadikan saran bagi pemerintah Kabupaten Kebumen dikarenakan kurangnya kontribusi pendapatan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dari laporan realisasi pendapatan Kabupaten Kebumen dapat dilihat untuk tiga tahun terakhir (2015-2017) jumlah pendapatan pajak daerah lebih banyak berkontribusi terhadapat Pendapatan Asli Daerah dibandingkan retribusi daerah. Salah satu penurunan pendapatan retribusi ini karena kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk membayar retribusi daerah.

# 3. Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen.

Hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2008-2017. Hal ini dinyatakan berdasarkan hasil uji F diperoleh F<sub>hitung</sub> sebesar 56,682 dan Sig 0,000 yang lebih besar jika dibandingkan dengan F<sub>tabel</sub> sebesar 4,74. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Kebumen maka Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen semakin meningkat, sebaliknya semakin rendah pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Kebumen maka Pendapatan Asli Daerah akan semakin menurun. Pernyataan ini sesuai dengan hasil penelitian kusuma dan wirawati (2013) bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, serta retribusi berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah se-Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2008-2017 dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Hasil pengujian secara parsial menunjukan bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008-2017.
- 2. Hasil pengujian secara parsial menunjukan bawa retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008-2017.
- 3. Hasil pengujian secara simultan menunjukan bahwa penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008-2017.

#### Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas dapat diambil saran-saran bagi pemeritahan Kabupaten Kebumen sebagai berikut:

 Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen sebaiknya berkonsentrasi untuk meningkatkan dan mengoptimalkan potensi daerah yang dimiliki baik dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, salah satunya dengan cara mengadakan sosialisasi supaya dapat

- meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Kebumen.
- Sebaiknya BAPPENDA untuk lebih mengoptimalkan retribusi daerah yang dimiliki, supaya penerimaan retribusi daerah bisa lebih memberikan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Asteria Beta. 2015. Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Jurnal Riset Manajemen 2(1): 51-61.
- Effendi, Dicki Andika. 2018. Analisis Pengaruh Pajak Daerah, dan Laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provisi Jawa Tengah Tahun 2015-2016. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta. Surakarta.
- Ghozali, Imam. 2009. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*. Edisi Keenam. Universitas
  Diponegoro. Semarang.
- \_\_\_\_\_\_. 2009. Ekonometrika: Teori, Konsep dan Aplikasi Dengan SPSS 17. Cetakan 2. Universitas Diponegoro. Semarang.
- \_\_\_\_\_\_.2013. Aplikasi Analisis

  Multivariate dengan Program IBM SPSS

  21. Badan Penerbit Universitas

  Diponegoro. Semarang.
- Hasmin, Andi P., M., dan Mattalatta. 2017.
  Analisis Pengaruh Penerimaan Retribusi
  Daerah danPajak Daerah Terhadap
  Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
  Pada Kabupaten Soppeng. *Jurnal Mirai Management*2(1): 175-193.
- Husein Muhammad Fakhri dan Achmad Tjahjono. 2009. *Perpajakan*. STIM YKPN. Yogyakarta.
- https://bappenda.kebumenkab.go.id/web/read/recent/penerimaan-pajak-daerah-tahun-2017-mencapai-115. Diakses pada 3 Desember 2018 pukul 09.00 WIB.

- Jannah Hamida El Laila Eka Nur., Imam Suyadi., dan Hamidah Hayati Utami. 2016. Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Studi Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Mojokerto. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*.10(1): 2.
- Kusuma dan Wirawati. 2013. Analisis Pengaruh Penerimaan Pajaka Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Peningkatan PAD Sekabupaten/Kota di Provinsi Bali. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 5(3): 574-585.
- Lakoy, T.W., Daisi S.M Engka., dan Steeva ylt. 2016. Kontribusi dan Pengaruh Penerimaan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Minahasa Selatan (2005-2014). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 16(01).
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan*. Edisi Revisi. C.V ANDI OFFSET. Yogyakarta.
- 2016. *Perpajakan*. Edisi Terbaru 2016. C.V ANDI OFFSET. Yogyakarta.
- Pohan Chairil Anwar. 2017. *Pembahasan KompentifPengantar Perpajakan Teori dan Konsep Hukum Pajak*. Edisi dua. Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Pratomo Arif. 2018. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2016. Laporan Tugas Akhir. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Putra Bangsa. Kebumen.
- Samudra, Azhari Aziz. 2015. Perpajakan Di Indonesia Keuangan Pajak dan Retribusi Daerah. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Siregar, Baldric. 2017. Akuntansi Sektor Publik. Edisi Dua. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Sugiyono. 2009. *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Cetakan Kesebelas. Alfabeta. Bandung.

- Susyanti Jeni dan Ahmad Dahlan. 2015. *Perpajakan*. Empatdua Media. Jatim.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- Waluyo. 2017. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 12. Salemba Empat. Jakarta Selatan.
- Yusuf Barmin. 2018. Analisis Evektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo. *Gorontalo Development Review*.1 (1): 1.
- Zain Mohammad. 2007. *Manajemen Perpajakan*. Edisi Tiga. Salemba Empat. Jakarta.